

DAFTAR ISI

COVER
PERATURAN NAGARI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I.PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Manfaat

BAB II.GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
- 2.3 Pembiayaan

BAB III.EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari tahun sebelumnya
- 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI:

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN(Lampirkan foto pelaksanaan)

1. Daftar Prioritas Masalah
2. Tabel (Matrik)Program/Kegiatan Enam Tahun
3. Berita acara dan Daftar Hadir(Pembentukan tim,Pencematan,musrenbang RKP,Penetapa Bersama BAMUS)
4. SK Tim Penyusun RKP Nagari
5. Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Proposal Teknis RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa (DU RKP)

DAFTAR USULAN RKP PRIORITAS (DU-RKP PRIORITAS)
HASIL MUSRENBANG NAGARI TAHUN 2018
TAHUN ANGGARAN 2020

Nagari /Desa : Amping Parak
 Kecamatan : Sutera
 Kabupaten : Pesisir Selatan
 Provinsi : Sumatera Barat

No	KEGIATAN	TARGET/SASARAN	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)				KET
				APB Nagari	APB Kab	APB Prop	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FISIK SARANA PRASARANA							
1	Pemasangan batu jeti / Groing	Mengatasi Abrasi Pantai	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai				60.000.000.000	
2	Normalisasi Muaro Amping Parak	Mengatasi banjir	Padang tae, Ps.Amping Parak, Padang Lawe				150.000.000.00 0	
3	Pembuatan jaringan tambak	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok				1.000.000.000	
4	Pembangunan Sarana & Prasarana Pendukung Kawasan Terpadu Pantai Amping Parak (Kawasan Konservasi Penyu)	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ps. Amping Parak			1.000.000.000	1.500.000.000	
5	Pemb.Jembatan Gantung & Jalan Baru Kamp.Padang Lawe Menuju Padang Tae	Meningkatkan Jalur Transportasi	Padang Lawe,Padang Tae			1.350.000.000		
6	Aspal Jalan Rawang I & II	Meningkatkan Jalur Transportasi	Alai			2.400.000.000		
7	Sambungan Aspal Kamp.Padang tae Menuju Shalter	Meningkatkan Jalur Evakuasi	Padang tae			400.000.000		

8	Pemb.Drainase	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Ps.Amping Parak,Alai		900.000.000			
9	Peningkatan Jalan Padang Sumu	Meningkatkan Jalur Transportasi	Koto Tarok		950.000.000			
10	Peningkatan jalan Evakuasi Tsunami Kamp.Ujung Air Menuju Tanjung Gadang Amping Parak Timur	Meningkatkan Jalur Evakuasi	Ujung Air		950.000.000			
11	Saluran Irigasi Batang Surantih	Peningkatan hasil pertanian	Alai & Koto Tarok		800.000.000			
II	BIDANG EKONOMI							
1	Pembuatan & Penambahan Jaringan Tambak	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok				1.000.000.000	
2	Pengadaan Bantuan Bibit Penjantan/Induk Ternak Sapi Bali	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok				1.000.000.000	
3	Peremajaan Kelapa sawit Yang Sudah Tua	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok				1.000.000.000	
4	Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok			250.000.000		
5	Pengadaan kerambah Budi daya Kepiting	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok			300.000.000		
6	Pengadaan Bantuan ternak Sapi terintegrasikan Kebun Sawit	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok			300.000.000		

7	Pengadaan Bantuan Mesin dan Alat Tangkap Bagi Nelayan	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai		350.000.000			
8	Pengadaan Bantuan Pupuk Bersubsidi dan Pengadaan Bibit Unggul	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai, Padang Lawe, Koto Tarok		300.000.000			
9	Bantuan Keuangan GAPOKTAN				200.000.000			
III	BIDANG SOSIAL BUDAYA							
1	Penanaman Cemara Laut Dan Manggrof	Meningkatkan Lingkungan	Amping Parak				1.000.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas kelembagaan masyarakat hukum adat	ABS-SBK	Amping Parak				1.300.000.000	
3	Pendirian Bangunan Panti Asuhan					1.300.000.000		
4	Pengadaan Bedah rumah bagi Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai, Padang Lawe, Koto Tarok		360.000.000			
5	Sanitasi Lingkungan	Meningkatkan kesehatan Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai, Padang Lawe, Koto Tarok			950.000.000		
6	Pembentukan Kader Peduli Masyarakat Miskin, Yatim Piatu, Lansia Terlantar	Meningkatkan Kepedulian Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai, Padang Lawe, Koto Tarok			150.000.000		
7	Penambahan APE Luar Dan Dalam TK PAUD	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak, Alai, Padang Lawe, Koto Tarok		350.000.000			

8	Pembangunan MDA	Meningkatkan Mutu Pendidikan Keagamaan	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok		350.000.000			
9	Penambahan Kartu KIS	Meningkatkan Pelayanan kesehatan Masyarakat	Ujung Air, Padang tae, Ps. Amping Parak,Alai, Padang Lawe,Koto Tarok				1.000.000.000	

Disekapati oleh

Wali Nagari
Amping Parak



(YUSMARDI)

Ketua Bamus
Nagari Amping Parak

(.....)

Anggota DPRD Dapil III

(.....)

Ketua LPMN
Nagari Amping Parak

(.....)

Pendamping Lokal
Desa

(.....)

Unsur TP-PKK

(.....)

Kader Pembangunan
Nagari Amping Parak

(.....)

Niniak Mamak

(.....)

Unsur Bundo Kandung Nagari.

(.....)

MUI Nagari

(.....)

PHOTO KEGIATAN

Kegiatan
MUSNA PENYUSUNAN RKP
LOKASI
Nagari Amping Parak Kec.sutera
Keterangan Gambar



Rapat Penyusunan RKP

Kegiatan
Pedampingan Penyusunan APB Nag
LOKASI
Nagari Amping Parak Kec.Sutera
Keterangan Gambar



Musyawarah Nagari penyusunan RKP

PERATURAN NAGARI AMPING PARAK

NOMOR : 4 Tahun 2018

TANGGAL : 14 September 2018



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-Nag)

TAHUN ANGGARAN 2019

NAGARI AMPING PARAK

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROPINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK

Alamat: Jalan Raya Painan - Kambang KM – 45 Amping Parak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2019

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparatatur pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun sehingga dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Nagari Amping Parak 2018

Ketua Tim Penyusun RKP,

(YENDRI)



**WALI NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPING PARAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Nagari AMPING PARAK Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

29. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
30. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
31. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentangPendiriandanPengelolaanBadan Usaha MilikNagari;
32. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas

Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Amping Parak Selatan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2018
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Nagari Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Nagari
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Tahun 2018

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Amping Parak.

Diundangkan di Nagari Amping Parak

14 September 2018

Sekretaris Nagari

(YENDRI)

Ditetapkan di Amping Parak

6 September 2018

Wali Nagari Amping Parak

(YUSMARDI)

Lembaran Nagari Tahun 2018 Nomor 4 Tahun 2018

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI AMPING PARAK NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Amping Tahun 2019 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

B. Visi dan Misi Nagari Amping Parak

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi.

Visi Nagari Amping Parak

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Nagari harus selaras dengan RPJM Nagari, maka RKP Nagari Amping Parak Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Nagari Amping Parak yang tertuang dalam RPJM Nagari Amping Parak Tahun 2017 - 2023, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Amping Parak, yaitu :

“Membangun Pemerintahan Nagari Yang Profesional, Efisien, Efektif, Bertanggung Jawab, Melestarikan dan Memajukan Adat Istiadat serta mengoptimalkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari dalam Menunjang Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang baik”

dan Visi adalah : **“ TERWUJUTNYA NAGARI AMPING PARAK YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA ISLAMI ”.**

“

MISI NAGARI AMPING PARAK

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada diatas Misi ,pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan /dikerjakan sebagaimana penyusunan visi ,misipun dalam penyusunanya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Amping Parak, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Amping Parak adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Nagari Amping Parak yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian rakyat melalui pengembangan hasil usaha pertanian.
3. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil, industry rumah tangga , melalui pengembangan modal usaha.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar melalui sistem Program Pendidikan Nasional.
5. Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan organisasi kelembagaan yang di Nagari Amping Parak
6. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Recorving, rehabilitas Pemerintahan Nagari

1.2 Landasan Hukum

RKP Nagari Amping Parak Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014
8. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
9. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan
12. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
14. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
15. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
16. Permendesa No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
17. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010 - 2030 Kabupaten Pesisir Selatan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Nagari
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 46 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh 2017 - 2022 - (Kecamatan Koto XI Tarusan)

Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 47 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dengan Sapi Bali 2017 – 2022 (Kecamatan Silaut)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Nagari Amping Parak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Amping Parak tahun 2019

Tujuan dari penyusunan RKP Nagari Amping Parak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari Amping Parak tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari Amping Parak Tahun 2017 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Nagari Amping Parak yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2019

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan RKP Nagari Amping Parak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari
3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2019 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Nagari tahun 2018 sebesar Rp 1.832.492.400,-

1. Pendapatan asli nagari

- | | |
|--|---------------|
| • Hasil usaha nagari | Rp. 3.600.000 |
| • Hasil kekayaan nagari | Rp.- |
| • Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat | Rp.- |
| • Lain-lain pendapatan nagari yang sah | Rp. 6.600.000 |

2. Pendapatan Transfer Rp.....

- | | |
|---|-------------------|
| • Alokasi dana desa | Rp. 688.576.700 |
| • Dana Desa | Rp. 1.006.541.000 |
| • Bagi Hasil Pajak/Restribusi kabupaten | Rp. 77.174.700 |
| • Bagi Hasil Restribusi | Rp.- |

3. Bantuan keuangan pemerintah provinsi	Rp. 50.000.000
---	----------------

4. Bantuan Pemerintah Kabupaten	Rp.-
---------------------------------	------

2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Uraian Jumlah (Rp)

● Belanja Pegawai	: Rp. 437.190.000
● Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 638.589.406
● Belanja Modal	: Rp. 672.935.915
● Belanja Tidak Terduga	: Rp. -

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1.Penerimaan Silpa Tahun 2017	Rp. 59.864.410,34
2.Penerimaan Silpa Tahun 2018	Rp. 60.000.000,00
3.Penyertaan Modal Bum nag Tahun 2018	Rp. 60.000.000,00

BAB III

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Tahun 2018 dalam bidang

1. Pemerintahan yang di danai oleh dana nagari terlaksana 85 %
2. Pembangunan yang di danai oleh dana nagari terlaksana 53 %
3. Pembinaan yang di danai oleh dana nagari terlaksana 92 %
4. Pemberdayaan yang didanai oleh alokasi dana nagari terlaksana 87 %

3.1.1 Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1. Penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di danai oleh alokasi dana nagari terlaksana 85%

Tabel 1.1

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2018

No.	Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Nagari					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	Amping parak	12	244.800.000	ADD	12	244.800.00	ADD
2	Tunjangan jabatan wali dan perangkat		12	99.600.000	ADD	12	99.600.000	ADD
3	Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari	Amping Parak	5 org/thn	58.200.000	ADD	5 Org/Thn	58.200.000	ADD
4	Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor	Amping Parak	1 Paket	28.000.000	ADD	1 Paket	28.000.000	ADD
5	Operasional Bamus	Amping	5 Orang	15.000.000	ADD	5 Orang	15.000.000	ADD

		Parak	/ Thn			/ Thn		
6	Operasional Nagari	Ampin g Parak	1 Paket	35.000.000	ADD	1 Paket	35.000.000	ADD
7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari	Ampin g Parak	10 Bulan	13.500.000	ADD	10 Bulan	13.500.000	ADD
8	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	Ampin g Parak	1 Paket	22.600.000	ADD	1 Paket	22.600.000	ADD
9	Perencanaan Pembangunan Nagari	Ampin g Parak	1 Paket	5.747.000	ADD	1 Paket	5.747.000	ADD
10	Pengadaan Perlatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Ampin g Parak	1 Paket	14.200.000	ADD	1 Paket	14.200.000	ADD
11	Pemeliharaan Gedung Kantor	Ampin g Parak	1 Paket	6.500.000	ADD	1 Paket	6.500.000	ADD
12	Operasional Distribusi Rastra	Ampin g Parak	1 Paket	17.418.000	ADD	1 Paket	17.418.000	ADD
13	Operasional Kolektor PBB	Ampin g Parak	1 Paket	12.936.500	ADD	1 Paket	12.936.500	ADD
14	Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Ampin g Parak	1 Paket	5.000.000	ADD	1 Paket	5.000.000	ADD
15	Pembangunan Gedung Kantor	Ampin g Parak	1 Paket	32.000.000	ADD	1 Paket	31.464.600	ADD

3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pada bidang pembangunan nagari yang didanai oleh dana nagari terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antra lain

Tabel 1.2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan nagari Tahun 2018

No	Perencanaan Kegiatan Pembangunan Nagari					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan(Gedung Poskesri)	Nagari Amping Parak	3 Paket	499.440.013,21	DD	3 Paket	499.440.013,21	DD
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat (Jamban)	Nagari Amping Parak	2 Unit	7.000.000,00	DD	2 Unit	7.000.000,00	DD
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni	Nagari Amping Parak	2 Unit	31.000.000,00	DD	2 Unit	31.000.000,00	DD

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Tabel 1.3

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2018

No	Perencanaan Kegiatan Pembinaan Nagari					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	Amping Parak	1 Paket	8.000.000	ADD	1 Paket	8.000.000	ADD
2	Kesenian Dan sosial Budaya	Amping Parak	1 Paket	8.500.000	ADD	1 Paket	8.500.000	ADD
3	Penigkatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Amping Parak	1 Paket	2.500.000	ADD	1 Paket	2.500.000	ADD
4	Pembinaan Lembaga Adat	Amping Parak	1 Paket	3.500.000	ADD	1 Paket	3.500.000	ADD
5	Pembinaan LPMN	Amping Parak	1 Paket	5.000.000	ADD	1 Paket	5.000.000	ADD
6	Penigkatan Nilai-Nilai Keagamaan	Amping Parak	1 Paket	15.255.706,17	ADD	1 Paket	15.255.706,17	ADD
7	Pembinaan Kader yandu/KB	Amping Parak	1 Paket	50.788.000,00	ADD	1 Paket	50.788.000,00	ADD

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana nagari terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

Tabel 1.4

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2018

No.	Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Nagari					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pelatihan Wali Nagari dan Perengkat	Amping Parak	12 Bulan	35.999.500	ADD	12 Bulan	35.999.500	ADD
2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Amping Parak	12 Bulan	34.412.600	ADD	12 Bulan	34.412.600	ADD
3.	Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan PMT	Amping Parak	12 Bulan	37.720.000	DD	12 Bulan	37.720.000	DD
4.	Pelatihan Kelompok Tani dan Nalayan	Amping Parak	12 Bulan	4.827.000	DD	12 Bulan	4.827.000	DD
5.	Bulan Bakti Goro	Amping Parak	1Paket	17.058.100	DD	1Paket	17.058.100,00	DD
6.	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Amping Parak	12 Bulan	287.001.000	DD	12 Bulan	287.001.000	DD
7.	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Amping Parak	12 Bulan	7.580.000	DD	12 Bulan	7.580.000	ADD

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan peraturan nagari nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

3.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa

- Kurangnya SDM
- Pelatihan Perangkat dan Lembaga Nagari

3.2.2. Bidang pelaksanaan pembangunan

- Pembebasan Lahan Masyarakat
- BGRM Tiap Kampung
- Drainase Tidak ada
- Sering Terjadi Abrasi Pantai, Longsor

3.2.3. Bidang pembinaan masyarakat

- Pembinaan Adat Istiadat
- Kurangnya Insentif Guru TK-PAUD
- Perlunya Insentif Imam Khatib
- Pembinaan Seni Tradisional
- Penambahan Rastra

3.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

- Kurangnya Kegiatan Pelatihan-Pelatihan
- Penambahan Kelompok SPP
- Kurangnya Modal Usaha

3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

- Pengadaan Dapur Umum dan Logistik Darurat Bencana

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- Abrasi Pantai yang terjadi di Kampung Ujung air
- Tebing Runtuh yang terjadi di Kampung Padang Lawas
- Bencana Longsor yang terjadi di Kampung Koto Tarok

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Masalah tersebut meliputi :

- Kurangnya Tenaga Ahli di Lapangan
- Anggaran Biaya yang tidak memadai..
- Dll

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM / PEMBANGUNAN NAGARI

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, Prndayagunaan sumberdaya alam, pelestarianadat istiadat dan sosial budaya nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari. Adapun kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran nagari, kewenangan nagari dan secara teknis dilapangan nagari mempunyai sumber daya.

Tabel 1.5
RKP Nagari Amping Parak Tahun anggaran 2019

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	1. Belanja Pegawai dan Tunjangan	Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah Nagari guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.	Amping Parak
	2. Tunjangan dan Operasional Bamus Nagari	Meningkatkan kinerja Bamus Nagari	Amping Parak
	3.Jaminan Ketenagakerjaan dan Kesehatan BPJS Pegawai	Meningkatkan Kinerja Pegawai	Amping Parak
	4.Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Meningkatan Pelayanan Masyarakat	Amping Parak
	5.Perencanaan Pembangunan Nagari	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Amping Parak
	6. Operasional Perkantoran	Memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah nagari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari	Amping Parak
	7.Profil Nagari	Untuk Memperjelas Sejarah Nagari dan Batas2 nya	Amping Parak
	8.Lomba Nagari	Untuk Membangun Partisipasi Pemuda	Amping Parak

		dan pemuda	
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	1. Pembukaan Jalan baru dan Peningkatan Jalan Usaha Tani	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Amping Parak
	2. RTLH	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Amping Parak
	3. WC/Jamban	Meningkatkan Kebersihan Masyarakat	Amping Parak
	4. Penghijauan Pantai	Menciptakan Lingkungan Yang Sehat	Amping Parak
	5. BumNag Nagari	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Amping Parak
	6. Wifi	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Amping Parak
III	Bidang Pembinaan kemasyarakatan Nagari		Amping Parak
	1. Pelatihan dan Pembinaan PKK	Meningkatkan Keterampilan Ibu ibu Rumah Tangga	Amping Parak
	2. Peningkatan Nilai2 Kebangsaan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Amping Parak

	3.Peningkatan Nilai2 Keagamaan	Meningkatkan Ilmu Pengetahuan TTg agama	Amping Parak
	4.Pembinaan Lembaga Adat	Untuk Membina Generasi Muda sebagai penerus adat istiadat	Amping Parak
	5.Pembinaan Kader-Kader Nagari	Untuk Meningkatkan keterampilan para kader nagari	Amping Parak
	6.Pelatihan dan Pembinaan LPMN	Untuk meningkatkan Lembaga masyarakat	Amping Parak
	7.Pengadaan Posing dan Pengolahan Sampah Padat dan Cair	Untuk memberantas nyamuk....demam berdarah	Amping Parak
	8.Pembinaan Kesenian Tradisional	Meningkatkan hobi generasi muda akan musik tradisional kita	Amping Parak
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
	1.Pelatihan Dan Study Banding Wali Dan Perangkat	Meningkatkan Mutu Pelayan masyarakat	Amping Parak
	2.Meningkatkan Mutu Pelayanan diBid. Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan Insentif Untuk guru PAUD/TPSA	Amping Parak
	3.Pemberdayaan Posyandu dll	Memberikan Insentif Kader Kb,Posyandu,DLL	Amping Parak
	4.Pelatihan kelompok Tani/Nelayan	Memberikan Pelatihan Kelompok Untuk Masyarakat	Amping Parak

	5.BGRM	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergotong royong	Amping Parak
	6.Study Banding Bamus dan PKK Nag.	Meningkatkan Pelayanan Lembaga Nagari	Amping Parak
V	Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak		
	1. Pengadaan Dapur Umum Dan Logistik Darurat Bencana	Untuk membantu meringankan beban masyarakat yg terkena bencana	Amping Parak

4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat nagari akan tetapi pemerintah nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi , baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi peserta nagari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Tabel 1.6

Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2019

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
I	Penyelenggaraan Pemerintahan		
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
IV	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan		
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak		

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

ADD : Rp.

DD : Rp.

APBD KABUPATEN :

APBD PROPINSI :

Tabel 1.7

Pagu Indikatif Nagari Amping Parak Tahun 2019

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari					
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari		350.000.000,0 0			
2	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari		120.000.000,0 0			
3	Penghasilan Tetap Staff Nagari dan Staff Bamus		18.000.000,00			
4	Tunjangan Staff Nagari dan Staff Bamus		4.800.000,00			
5	Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari		75.000.000,00			
6	Jaminan Ketenaga kerjaan Perangkat Nagari		6.000.000 ,00			
7	Jaminan Kesehatan Wali Nagari & Purna Bakti		6.000.000,00			

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
8	Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari		6.000.000,00			
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nagari		50.000.000,00			
10	Operasional Bamus		20.000.000,00			
11	Operasional Nagari		40.000.000,00			
12	Honor Pengelolah Keuangan Nagari		25.000.000,00			
13	Pemeliharaan Gedung Kantor		7.000.000,00			
14	Perencanaan Pembangunan Nagari		10.000.000,00			
15	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor		50.000.000,00			
16	Profil Nagari		6.000.000,00			
17	Operasional Kolektor PBB		16.000.000,00			
18	Operasional Distribusi Raskin		20.000.000,00			

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
19	Pemutahiran Data Aset-Aset Nagari		6.000.000,00			
20	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000.000,00			
21	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari		40.000.000,00			
22	PHBI		18.000.000,00			
23	PHBN		10.000.000,00			
24	Pakaian Dinas Wali dan Perangkat		10.000.000,00			
25	Partisipasi Lomba Nagari Sehat		15.000.000,00			
26	Rehan Gedung Kantor KAN		50.000.000,00			
27	Rehap Gedung Kantor Wali Nagari		50.000.000,00			
II.	Pelaksanaan Pembangunan Nagari					
1	Pembukaan Jln baru Rwg II ke Rwg I Alai	190.000.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
2	Peningkatan Jln PNPM 2009 Rawang Ps.Amping Parak	190.000.000				
3	Pembukaan Jln Baru Pemukiman Penduduk Ujung air	190.000.000				
4	Bumnag Nagari	70.000.000,0 0				
5	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	90.000.000,0 0				
6	Jamban	25.000.000,0 0				
7	Internet	7.000.000,00				
8	Penghijauan	5.000.000,00				
9	Pembukaan Jalan Baru	400.000.000, 00				
10	Peningkatan Jalan	400.000.000, 00				
11	Pembuatan Plat Dekker	70.000.000				
12	Peningkatan Pasilitas Konservasi Penyu	70.000.000				

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari					
1	Pembinaan dn Pelatihan Organisasi Perempuan/PKK dan Insentif Kader Dasa Wisma		10.000.000,00			
2	Peningkatan Nilai- Nilai Kebangsaan		5.000.000,00			
3	Pembinaan Lembaga Adat		4.000.000,00			
4	Peningkatan Nilai- Nilai Keagamaan		9.000.000,00			
5	Pembinaan Kader Yandu,KB,PPKBD,B KB		6.000.000,00			
6	Pelatihan dan PembinaanLPMN		7.000.000,00			
7	Honorium Kader Yandu		50.000.000,0 0			
8	Honorium Kader KB		5.000.000,00			
9	Pembinaan Kesenian dan Tradisioanal (Beli alat alat musik Tradisional)		20.000.000,00			

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
10	Pengadaan Posing /Semprot Nyamuk		5.000.000,00			
11	Insentif kader kader Nagari		12.000.000,00			
12	Pembinaan LINMAS Nagari		5.000.000,00			
13	Pengadaan Pengelolaan Sampah Cair n Padat		10.000.000,00			
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1	Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat		40.000.000,00			
2	Study Banding Wali Nagari dan Perangkat Nagari		21.000.000.00			
3	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Insentif Guru TPSA /TK PAUD)	287.001,000, 00				
4	Peningkatan Kapasitas Lembaga	25.292.600,0				

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
	Masyarakat (Platihan Mun,Bundo Kandung,Bamus,P eternakan)	0				
5	Pemberdayaan Posyandu,UP2K,BK B,PMT		35.948.000,00			
6	Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan	10.000.000,00				
7	BGRM	25.000.000,00				
8	Pelatihan-Pelatihan Pemuda Nagari	50.000.000,00				
9	Pelatihan Kader Kader Nagari	50.000.000,00				
10	Study Banding Bamus Nagari		20.000.000			
11	Study Banding TP-PKK Nagari		15.000.000			
V	Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat					

	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupat en
	dan Mendesak					
	1. Pengadaan Dapur Umum dan Logistik Darurat Bencana	20.000.000,00				
TOTAL		1.698.993.600	1.317.800.000			

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada Tanggal : 14 September 2018

Wali Nagari Amping Parak



(YUSMARDI)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - Nagari
(RAPAT TIM PENYUSUN RKP Nagari)

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Nagari, di Nagari
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Nagari oleh tim penyusun
RKP Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Nagari adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Nagari sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Nagari, di Nagari
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang
dihadiri oleh kepala Nagari, unsur perangkat Nagari, BPD, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta

A. Materi

1. Evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2018
2. Ekspose hasil verifikasi oleh tim verifikasi
3. ekspose hasil penyusunan rancangan tahun 2019 dan DU RKP
Tahun 2020
4. Membahas dan menyepakati rancangan RKP tahun 2019
yang akan didanai APB Nagari dan DU RKP 2020

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin

Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamus

....., 2018

Wali Nagari

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP NAGARI
MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RKP Nagari di Nagari
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Nagari yang dihadiri oleh kepala Nagari, unsur perangkat Nagari, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Nagari ini serta yang bertindak selaku

A. Materi

Pencermatan RPJM Nagari

Kriteria dan pembentukan tim Penyusun dan Tim verifikasi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Bamus

Wali Nagari

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2019

NAGARI : AMPING PARAK
KECAMATAN : SUTERA
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		350,000,000	ADD				
		2	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		120,000,000	ADD				
		3	Tunjangan Kehormatan Bamus	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Bamus		75,000,000	ADD				
		4	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		8,100,000	ADD				
		5	Jaminan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		5,000,000	ADD				
		6	Operasional Bamus	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Bamus		20,000,000	ADD				
		7	Operasional Perkantoran	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		40,000,000	ADD				
		8	Pelaksanaan Musrenbang	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		40,000,000	ADD				
		9	Operasional Pemungutan PBB-P2	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		16,000,000	ADD				
		10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		50,000,000	ADD				
		11	Pemutakhiran Data Aset Pemerintahan Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		6,000,000	ADD				
		12	Pemeliharaan Gedung Kantor	Nagari Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		7,000,000	ADD				
		13	Kegiatan PHBI	Nagari Amping Parak	12	Masyarakat		18,000,000	ADD				
		14	Operasional RASKIN 2016	Nagari Amp.Parak	12	Masyarakat		20,000,000	ADD				
		15	Kegiatan PHBN	Nagari Amping Parak	12	Masyarakat		10,000,000	ADD				
		16	Partisipasi Lomba Nagari Sehat	Nagari Amping Parak	12	Masyarakat		15,000,000	ADD				
		17	Pakaian Dinas Wali dan Perangkat	Nagari Amping Parak	12	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari		7,000,000	ADD				
		18	Perencanaan Pembangunan Nagari	Nagari Amping Parak	12	Masyarakat		10,000,000	ADD				
		19	Penetapan Batas Nagari dan Insentifnya	Nagari Amp.Parak	12	Penentuan batas wilayah Nagari		50,000,000	ADD				
		20	Rehap Gedung Kantor Kan	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		50,000,000	ADD				
		21	Profil Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		6,000,000	ADD				
		22	Study Banding Wali Nagari,Perangkat Dan Bamus	Nag.Amp.Parak	1 Paket	Perangkat Nagari		22,000,000	ADD				
		23	Penyusunan Peta Aset Nagari dan Peta Administrasi Nagari (Tapal Batas)	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		40,000,000	ADD				
		24	Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Wali Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat		25,000,000	ADD				

		25	Rehap Gedung Kantor Wali Nagari	Nagari Amp.Parak	12	Meningkatan Pelayanan Masyarakat	50,000,000	ADD				
			Jumlah Per Bidang 1					492,000,000				
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Jalan Baru Rawang II ke Rwg I Alai	Alai	935 M	Masyarakat	198,870,000	DD				
		2	Peningkatan Jalan PNPM 2009 Rawang	Ps.Amp.Parak	750 M	Masyarakat	167,250,000	DD				
		3	Pembangunan Jalan Baru Pemukiman Penduduk Kampung Ujung Air	Ujung Air	921 M	Masyarakat	187,800,000	DD				
		4	Penambahan Modal Bumrag	Nagari Amp.Parak	1 PAKET	Masyarakat	100,000,000	DD				
		5	Penghijauan Pantai Padang Tae	Padang Tae	300 M	Masyarakat	50,000,000	DD				
		6	Parit Miring Rawang II Alai	Alai	400 M	Masyarakat	100,000,000	DD				
		7	Pembangunan Jalan Baru Pemukiman Penduduk Ps.Amping Parak	Ps.Amp.Parak	400 M	Masyarakat	180,000,000	DD				
		8	Pembangunan RTLH / Rumah Tangga Miskin	Nagari Amping Parak	6 Unit	Masyarakat	95,000,000	DD				
		9	Pembangunan Jamban / WC Rumah Tangga Miskin	Nagari Amping Parak	6 Unit	Masyarakat	19,000,000	DD				
		10	Pembangunan Jalan Baru Padang Tae ke Padang Lawe	Padang Tae	250 M	Masyarakat	80,000,000	DD				
		11	Rehap TK PAUD dan Pengadaan APE dan Mobiler				20,000,000	DD				
		12	Pembangunan Jalan Baru Kebun Sawit Ujung Air	Ujung Air	300 M	Masyarakat	90,000,000	DD				
		13	Pembangunan Jalan Baru Padang Lawe ke Padang Tae	Padang Lawe	500 M	Masyarakat	100,000,000	DD				
		14	Peningkatan Jalan Usaha Tani ke Rawang Harapan	Padang Lawe	400 M	Masyarakat	90,000,000	DD				
		15	Pembangunan Jalan Baru Dari Bukik Bungo Ke Tandikek	Koto Tarok	400 M	Masyarakat	85,000,000	DD				
		16	Pembangunan Plat Dekker	Koto Tarok	400 M	Masyarakat	70,000,000	DD				
		17	Peningkatan Fasilitas Konservasi Penyu (Pariwisata)	Ps.Amp.Parak	300 M	Masyarakat	70,000,000	DD				
		18	Pembangunan Jalan P2LP ke Padang Tae	Koto Tarok	300 M	Masyarakat	110,000,000	DD				
		19	Pembangunan Tambatan Perahu	Ps.Amp.Parak	1 PAKET	Masyarakat	75,000,000	DD				
			Jumlah Per Bidang 2					1,887,920,000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Honorarium Kader YANDU	Nag.Amp.Parak	12	Kader Nagari	50,000,000	ADD				
		2	Honorarium Kader KB	Nag.Amp.Parak	12	Kader Nagari	5,000,000	ADD				
		3	Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan (Pembelian Alat-alat Musik Tradisional)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	20,000,000	ADD				
		4	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	4,000,000	ADD				
		5	Keg.Pemb./Pelatihan TP-PKK Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	10,000,000	ADD				
		6	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	9,000,000	ADD				
		7	Pengadaan Posing/Penyemprotan Nyamuk	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	5,000,000	ADD				
		8	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS Nagari dan Pengadaan Poskamling	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	5,000,000	ADD				
		9	Kegiatan Peningkatan Nilai Kebangsaan	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	5,000,000	ADD				
		10	Kegiatan Pelatihan / Pembinaan LPMN	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	5,000,000	ADD				
		11	Pengadaan Pengelolaan Sampah Cair dan Padat	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	6,000,000	ADD				
		12	Kegiatan Pelatihan Menjahit	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	10,000,000	ADD				
			Jumlah Per Bidang 3					134,000,000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan Pemberdayaan Bulan Bakti Goro Masyarakat (BGRM)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	30,000,000	DD				
		2	Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Perangkat Nagari	10,000,000	ADD				
		3	Pelatihan TIM PPHP	Nag.Amp.Parak	1 Paket	Masyarakat	10,000,000	DD				
		4	Pengadaan Bibit Unggul Pertanian/Peternakan	Nag.Amp.Parak	12	Kader Nagari	20,000,000	DD				
		5	Kegiatan Program Makanan Tambahan (PMT) Balita	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	37,000,000	DD				
		6	Pelatihan Pemuda (Perbengkelan,Olah Raga ,Kesenian,Komputer dan Elektronik)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	50,000,000	DD				
		7	Pelatihan Adat Istiadat Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	6,000,000	DD				
		8	Pelatihan Mubaliq	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	10,000,000	DD				
		9	Pelatihan Randat	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	6,000,000	DD				
		10	Pelatihan Kader-Kader Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Kader Nagari	10,000,000	DD				
		11	Pelatihan Pengurus Majelis Taqlim	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	5,000,000	DD				
		12	Pelatihan Guru PAUD/TPSA,TPA	Nag.Amp.Parak	12	Guru PAUD/TPSA/TPA	6,000,000	DD				
		13	Pelatihan Kerajinan Industri Masyarakat	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat	6,000,000	DD				
		14	Insentif Guru TK/PAUD	Nag.Amp.Parak	12	Guru Paud	100,000,000	DD				
		15	Pelatihan MUN/MUI	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	5,000,000	ADD				
		16	Pelatihan BAMUS	Nag.Amp.Parak	1	Bamus	7,000,000	ADD				
		17	Insentif Guru TPA/TPSA	Nag.Amp.Parak	12	Guru Mengaji	200,000,000	DD				
		18	Pelatihan Niniek Mamak, Bundo Kandung	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	6,000,000	DD				
		19	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	6,000,000	DD				
		20	Pelatihan Imam Khatib	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	6,000,000	DD				
		21	Sosialisasi IB,Pengadaan Alat-alat IB dan Tindaklanjut y	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	43,000,000	DD				
		22	Liga Nagari (Lomba Olah Raga Antar Nagari)	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat	25,000,000	DD				

		23	Pengadaan Nagari Komuditi Senter/Forum Nagari	Nag.Amp.Parak	1	Masyarakat		10,000,000	DD				
		24	Pelatihan Kader Nagari Siaga Aktif	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		6,000,000	DD				
		25	Pelatihan dan Study Banding Koperatif TP-PKK Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		27,500,000	DD				
		26	Pelatihan Pencegahan Stanting	Nag.Amp.Parak	1 Paket	Masyarakat		5,000,000	DD				
		27	Pembentukan dan Pengembangan Budaya Hukum berserta perlindungan y	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		10,000,000	DD				
		28	Bantuan Biaya Operasional Kelompok Peduli Lingkungan	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		10,000,000	DD				
		29	Insentif Kader Dasa Wisma	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		10,000,000	DD				
		30	Pengadaan Mobiler TK PAUD dan Buku Perpustakaan	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		30,000,000	DD				
		31	Inovasi Nagari (Produk Unggulan Nagari)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		30,000,000	DD				
		32	Pengadaan Bibit Apotik Hidup dan Hultikultura	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		6,000,000	DD				
		33	GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		6,000,000	DD				
		34	Pembuatan Website Nagari (Biogas,Pariwisata dan Info Nagari)	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		8,000,000	DD				
		35	Lomba MTQ Tingkat Nagari	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		8,000,000	DD				
		36	Insentif Kader Poskes ,Nelayan, Tani,BKR, Bina Lansia,kader teknik dan Nagari Siaga DLL	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		10,000,000	DD				
		37	PelatihanTim PB Nagari dan Kampung	Nag.Amp.Parak	12	Masyarakat		40,000,000	DD				
		Jumlah Per Bidang 4						820,500,000					
5	Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Pengadaan Dapur Umum dan Logistik Darurat Bencana					20,000,000	DD				
		2	Pengadaan Kotak Obat P3K					5,000,000					
		3	Pengadaan Jamban Darurat					5,000,000					
		4	Pembangunan RTLH					30,000,000					
		Jumlah Per Bidang 5						60,000,000					
		JUMLAH TOTAL						2,573,920,000					

Mengetahui :
 Kepala Desa,

 (YUSMARDI)

Amping Parak, 14 September 2018
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

(YENDRI)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Desa

N KABUPATEN/KOTA

.....

.....

.....

.....

[illegible]

....., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)